

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemajuan pariwisata di Indonesia saat ini berkembang dengan cepat seiring dengan kemajuan zaman. Pariwisata merupakan salah satu penggerak utama yang berkontribusi besar pada ekonomi nasional (Putri et al., 2022). Berdasarkan data dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), pada tahun 2023 sektor pariwisata memberikan sumbangan sebesar 4,1% terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia (kemenparekraf.go.id). Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 mengenai Kepariwisataan mendukung pengembangan dan pembangunan sektor pariwisata. Regulasi ini menekankan pentingnya keseimbangan dalam pembangunan pariwisata, yang mencakup tiga aspek utama: keuntungan ekonomi, konservasi lingkungan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal (Remus et al., 2022).

United Nations World Tourism Organization (UNWTO) menyoroti kemungkinan dampak buruk pariwisata terhadap alam dan penduduk setempat, seperti berkurangnya keragaman spesies, pemanfaatan sumber daya alam yang tidak lestari, serta perubahan sosial ekonomi di kawasan wisata (Kusumawardhana, 2023). Pengembangan pariwisata berkelanjutan telah menjadi fokus utama dalam berbagai inisiatif pembangunan di Indonesia, khususnya di sektor pariwisata berbasis ekowisata. Ekowisata tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, tetapi juga menjaga

kelestarian alam dan warisan budaya (Putri et al., 2022). Ekowisata merupakan jenis wisata yang memiliki ciri khas tersendiri, di mana fokus utamanya adalah pada upaya konservasi lingkungan, pendidikan mengenai lingkungan, kesejahteraan masyarakat setempat, serta penghargaan terhadap budaya lokal (Murianto & Masyhudi, 2021).

Pamekasan di Jawa Timur memiliki kekayaan sumber daya pariwisata yang belum sepenuhnya dimanfaatkan. Potensi ini meliputi atraksi alam, budaya, dan kerajinan tangan yang tersebar di berbagai kecamatan. Ekowisata Mangrove di Desa Lembung, Kecamatan Galis, merupakan salah satu destinasi yang menerapkan konsep pariwisata berkelanjutan. Desa Lembung telah mentransformasi kawasan hutan mangrovenya menjadi tujuan wisata berbasis lingkungan sejak 2019. Pengembangan kawasan mangrove menjadi lokasi ekowisata merupakan langkah strategis di wilayah pesisir, karena dapat menghasilkan manfaat ekonomi dan ekologis tanpa merusak ekosistem mangrove itu sendiri (Yulianto et al., 2022). Namun, pengembangan kawasan ekowisata mangrove di suatu daerah menghadapi tantangan tersendiri. Hal ini disebabkan oleh persepsi masyarakat sekitar yang kurang mendukung kegiatan tersebut, padahal ekowisata merupakan bentuk wisata yang meliputi konsep pengembangan, penelitian, dan pendidikan (Islam & Lutfia, 2024). Untuk itu, diperlukan pendekatan komprehensif yang meliputi perencanaan strategis, pemanfaatan sumber daya yang bijak, pengendalian dampak, penguatan institusi, dan pemberdayaan masyarakat. Pengembangan harus

memperhatikan keseimbangan antara dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan dengan keterlibatan seluruh *stakeholder*. (Putri et al., 2022).

Pemerintah menjalankan pengawasan industri melalui berbagai instrumen seperti kementerian, badan, regulasi, dan skema pendanaan. Pemerintah mengemban tujuh fungsi dalam pengembangan pariwisata: mengoordinasi, merencanakan, mengatur, mendorong kewirausahaan, menstimulasi, memfasilitasi pariwisata sosial, dan melindungi kepentingan publik. (Indrayani & Setiawina, 2018). Ekowisata Mangrove Lembung, sebagai kawasan pariwisata dengan potensi pengembangan, diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan.

Partisipasi masyarakat penting untuk memajukan pariwisata dan mendorong perkembangan sektor ini (Kholifah, 2014). Dalam konsep pariwisata yang berkelanjutan, masyarakat berperan sebagai penggerak utama industri wisata daerah (Yatmaja, 2019). Tahapan partisipasi diawali dengan pemetaan masalah, potensi, dan kebutuhan warga, dilanjutkan dengan pemilihan solusi terbaik untuk mengatasi permasalahan (Wibowo & Belia, 2023). Dalam upaya pengembangan Ekowisata Mangrove Lembung, rendahnya partisipasi masyarakat sekitar menjadi persoalan krusial. Oleh karena itu, pengembangan pariwisata perlu diimplementasikan dengan melibatkan masyarakat secara aktif melalui penerapan strategi pemberdayaan yang mandiri dan inisiatif (Yatmaja, 2019).

Pemberdayaan masyarakat melalui pariwisata berkelanjutan adalah proses yang kompleks dan tidak terjadi secara otomatis. Diperlukan perencanaan yang matang, pengelolaan yang baik, komitmen dari semua pihak terkait, serta pemahaman mendalam tentang kondisi lokal dan aspirasi masyarakat setempat (Kusumawardhana, 2023). Pemberdayaan masyarakat meliputi berbagai dimensi, seperti pemberdayaan ekonomi, pemberdayaan sosial, pemberdayaan politik (Scheyvens, 1999). Berbagai langkah terus dilakukan untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat lokal di kawasan Ekowisata Mangrove Lembung, salah satunya dengan membentuk kelompok-kelompok yang melibatkan anggota masyarakat sekitar (Kusumawardhana, 2023).

Pengembangan kawasan mangrove lembung sebagai ekowisata memerlukan inisiatif pembangunan yang berkelanjutan dan membawa manfaat nyata untuk masyarakat di sekitarnya (Remus et al., 2022). Keberhasilan ini dapat dicapai melalui penerapan tata kelola yang efektif, di mana terdapat partisipasi dan kolaborasi yang seimbang antara sektor pemerintah, bisnis, dan masyarakat (Indrayani & Setiawina, 2018).

Mengacu pada konteks yang disampaikan, penelitian ini dimaksudkan untuk mengevaluasi dan mengkaji pengaruh kebijakan pemerintah, pemberdayaan, dan partisipasi masyarakat terhadap pengembangan pariwisata berkelanjutan di Ekowisata Mangrove Lembung Pamekasan. Temuan studi ini diharapkan dapat menjadi masukan berharga bagi

pemangku kebijakan dalam mengembangkan strategi pariwisata yang inklusif dan berkelanjutan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian situasi di atas, berikut rumusan masalah yang dapat diidentifikasi:

1. Apakah Kebijakan Pemerintah berpengaruh secara parsial terhadap Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan di Ekowisata Mangrove Lembung?
2. Apakah Pemberdayaan Masyarakat berpengaruh secara parsial terhadap Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan di Ekowisata Mangrove Lembung?
3. Apakah Partisipasi Masyarakat berpengaruh secara parsial terhadap Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan di Ekowisata Mangrove Lembung?
4. Apakah Kebijakan Pemerintah, Pemberdayaan Masyarakat, Partisipasi Masyarakat berpengaruh secara simultan terhadap Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan di Ekowisata Mangrove Lembung?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah tersebut, berikut tujuan pelaksanaan penelitian ini:

1. Untuk mengetahui apakah Kebijakan Pemerintah berpengaruh secara parsial terhadap Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan di Ekowisata Mangrove Lembung.

2. Untuk mengetahui apakah Pemberdayaan Masyarakat berpengaruh secara parsial terhadap Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan di Ekowisata Mangrove Lembung.
3. Untuk mengetahui apakah Partisipasi Masyarakat berpengaruh secara parsial terhadap Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan di Ekowisata Mangrove Lembung.
4. Untuk mengetahui apakah Kebijakan Pemerintah, Pemberdayaan Masyarakat, Partisipasi Masyarakat berpengaruh secara simultan terhadap Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan di Ekowisata Mangrove Lembung.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini juga memberikan manfaat, antara lain:

1. Penelitian ini bermanfaat bagi penulis dalam memperdalam pengetahuan dan wawasan terkait kebijakan pemerintah, strategi pemberdayaan, serta pola partisipasi masyarakat dalam mendukung pengembangan pariwisata berkelanjutan di Ekowisata Mangrove Lembung Pamekasan.
2. Memberikan kontribusi pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang pariwisata, khususnya terkait pengembangan pariwisata berkelanjutan berbasis ekowisata.
3. Studi ini dapat memperkaya koleksi referensi di perpustakaan fakultas ekonomi dan bisnis dan perpustakaan Universitas Trunojoyo Madura.